

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menceritakan fenomena pendidikan di Timor Leste, Bab ini mencatat rendahnya alokasi dana pendidikan menyebabkan angka non literasi yang tinggi di Timor Leste paska merdeka, dinamika politik domestik yang tak kunjung stabil memberikan dampak negative terhadap kebijakan dan tata kelola pendidikan di Timor Leste, dan bagaimana membuka kembali peluang-peluang kerja sama dengan Indonesia melalui mekanisme praktik diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara antara kedua pemerintah dan masyarakatnya, juga menggambarkan seberapa pentingnya peran Indonesia dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia Timor Leste yang kreatif, inovatif dan berkompeten. Beberapa sub bab yang termuat dalam bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan manfaat penelitian, d) originalitas riset, e) kerangka teori, f) jenis penelitian, g) metode pengumpulan data, h) metode analisis data, dan i) sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Paska kemerdekaan Timor Leste sebagai negara berdaulat *Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)*,¹ menghadapi banyak problem yang menyambut lahirnya negara tersebut, kesulitan

¹ Restauraun Independente Republica Democratica de Timor Leste, Dili, Timor Leste 2002

menghadapi tantangan-tantangan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di sektor pendidikan. Masa transisi dua tahun di bawah administrasi pemerintahan sementara PBB yang ditugaskan dalam misi *United Nations Transition Administration Of East Timor* (UNTAET) membantu pemerintah dan masyarakat Timor Leste untuk membangun kembali sarana dan prasarana pendidikan.² Namun hal tersebut tidak mudah, harapan akan bantuan internasional menjadi modal utama yang dapat membantu pemerintah Timor Leste untuk pembangunan khususnya sektor pendidikan di masa yang akan datang.

Salah satu faktor yang menghambat dalam membangun sektor pendidikan di Timor Leste adalah sejarah pendidikan, yang dimana Timor Leste telah mengalami perbedaan jaman pendidikan, yaitu jaman pendidikan Portugues selama 450 tahun, dan Indonesia selama 24 tahun, tentu saja warisan-warisan pendidikan seperti sistem pendidikan, kurikulum yang ditinggalkan oleh kedua negara membuat masyarakat dan pemerintah kesulitan dalam membuat kebijakan untuk membangun sektor pendidikan dan bagaimana praktek implementasi sistem pendidikan dalam proses belajar mengajar di Timor Leste.³

²Education for All (EFA)2015 National Review, Ministry education of Timor Leste, Hal 6

³Education for All (EFA)2015 National Review, Ministry education of Timor Leste, Hal 4

Tahun 2010 tercatat 60% masyarakat Timor Leste yang buta huruf (non literasi),⁴ yang tersebar di 13 Distrik di Timor Leste, jumlah penduduk sebesar 1,245,096 pada sensus penduduk tahun 2015 dari *Diresaun Statistika Nasional (DNE)* atau data statistic nasional Timor Leste.⁵Kendala-kendala tersebut nampak pada kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat terbatas, mengakibatkan sistem pendidikan mulai dari nasional sampai pada daerah terpencil tidak bisa terlaksana dengan baik apalagi berbicara mengenai kualitas dan mutu.

Gambar 1. Peta Timor Leste



Source : Wikipedia

⁴Education for All (EFA)2015 National Review, Ministry education of Timor Leste, Hal 47

⁵ Ministry of Education, Timor-Leste, The Education Databook 2015, Hal 200

Perkembangan pendidikan Timor Leste dinilai tidak seimbang dengan *Osamentento Geral Estado* (OGE) atau APBN. Indikator tersebut tidak luput dari rendahnya GDP yaitu 1,44 % (*Tradingeconomic, 2006- 2016*), menunjukkan bahwa negara belum mampu mengelola sumber daya alam untuk menopang pendidikan domestik. Mekanisme pengelolaan pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam Minyak dan Gas dinilai masih carut marut dalam tata kelolanya. Akibatnya menghambat perkembangan pendidikan domestik apalagi keinginan akan kualitas dan uji kompetensi tenaga pengajar dan murid. Faktor inilah memberikan dampak negatif terhadap kemampuan masyarakat yang tak kunjung bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, apalagi berkompetitif di dunia internasional maupun regional sebagai sebuah negara berdaulat.

Sistem pendidikan dinilai kurang memberikan kontribusi kepada para penuntut ilmu. Kurikulum yang tidak begitu memadai berdampak juga terhadap para tenaga pengajar, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Uji kompetensi tenaga pengajar tidak memenuhi kriteria standarisasi, namun memaksakan diri layaknya pihak yang berkompeten di bidangnya, ada beberapa kemungkinan bahwa hal ini merupakan kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu masyarakat menyadari akan kurangnya pendidikan domestik, sehingga mendukung arus mahasiswa yang kuliah di luar negeri baik itu beasiswa maupun

non beasiswa terutama di seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan sistem pendidikan di perguruan tinggi yang dapat menampung para generasi penerus bangsa. Khususnya Yogyakarta minimal 500 mahasiswa Timor Leste (*Data Imigrasi kelas II Yogyakarta*) yang melanjutkan kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta pada setiap tahunnya. Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan intensitas kerja sama dengan Indonesia di bidang pendidikan sangatlah penting bagi Timor Leste.

Hubungan kerja sama RI-RDTL paska kemerdekaan merupakan salah satu agenda politik luar negeri Timor Leste yang berada dibawah pimpinan Pak Xanana Gusmaõ. Begitupun pemerintah Indonesia juga memberikan kontribusi secara maksimal dengan penawaran beasiswa dan peringanan dalam proses administrasi bagi pelajar Timor Leste, seperti persyaratan perpanjangan Visa dan ijin tinggal tahunan. Dengan demikian sehingga hubungan bilateral kedua negara kembali baik dalam waktu yang cukup singkat, layaknya hubungan bilateral negara-negara lain yang tentu saja saling menguntungkan di seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara.⁶

Orientasi hubungan diplomasi dengan negara-negara lain juga direalisasikan sesuai dengan UU politik luar negeri Timor Leste. Seperti yang ditetapkan dalam konstitusi *RDTL pasal 8, dan pasal 87 tahun 2002*, yaitu seorang presiden untuk terus

⁶Hastutining Diah Wijayati, 2014, Hubungan bilateral RI-Tim-Tim pasca kemerdekaan, Hal 66

memantau para wakil duta besar yang ditugaskan di negara-negara lain untuk bertindak dan mengambil sikap kerjasama maupun yang berhubungan dengan ancaman terhadap politik dan keamanan domestik, perlu konsultasi dengan pihak pemerintahan untuk mengambil suatu keputusan, dan yang paling penting adalah peran wakil diplomat dalam meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia Timor Leste.

Slogan kerjasama luar negeri Timor Leste yakni, “*Halo Amigo Ba Ema Hotu-Hotu, No La Halo Inimigo Ba Ema Ida*”, yang artinya, *More Friendship Zero Enemy*. Slogan tersebut cenderung mendorong semangat para aktor negara maupun non-negara untuk terus menjalin hubungan kerja sama luar negeri, membuka jaringan kerja sama, seperti dijelaskan dalam ilmu hubungan internasional bahwa, transnasional diplomasi sangat penting dilakukan oleh sebuah negara, guna mempererat hubungan kerja sama yang telah dibina bersama, sama halnya Indonesia dan Timor Leste, bahkan membuka peluang kerja sama yang baru dengan negara-negara lain di kawasan yang berbeda sehingga dapat meningkatkan keamanan bilateral, regional untuk mencapai kepentingan nasional.⁷

Timor Leste dikatakan negara yang masih dependensi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sektor pendidikan termasuk kategori bidang yang masih tertinggal jauh

⁷ Konstitusi RDTL tahun 2002, Hal 122

dari yang diharapkan, oleh sebab ketergantungan dan keterbatasan itu dapat mendorong pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menentukan arah politik luar negeri Timor Leste yang akurat dan tentu saja berdampak positif. Khususnya sektor pendidikan, dalam hal kerja sama, Timor Leste lebih memilih Indonesia sebagai negara yang dianggap dapat membantu pemerintah RDTL dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Timor Leste.

Timor Leste sangat memerlukan kerja sama-kerja sama yang bersifat kolektif dan terintegrasi. Upaya meningkatkan kerja sama dengan Indonesia menjadi salah satu agenda utama dalam politik luar negeri Timor Leste di era Xanana dan Ramos Horta, ketergantungan ini dapat dilihat dari segi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang secara masif melanjutkan studi di Indonesia khususnya di beberapa kota propinsi di Indonesia seperti, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Malang dan kota propinsi lainnya.

Indonesia merupakan salah satu pilar utama di kawasan ASEAN yang sangat menguntungkan negara anggota yang ekonomi dan pendidikannya masih kurang stabil dibawa standar seperti Timor Leste. Meskipun Timor Leste belum masuk ASEAN, namun manfaat besar bagi Timor Leste dalam kerja sama di berbagai macam bidang terutama pendidikan, seperti pertukaran informasi, pembaharuan kurikulum berstandarisasi

regional dan internasional, minimalisir informasi yang dapat memicu konflik antara negara, sehingga fokusnya dalam pengembangan di bidang pendidikan dengan Indonesia menjadi agenda utama, dengan memberikan beasiswa oleh negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut, meningkatkan kesepakatan pembangunan manusia, melalui pertukaran tenaga ahli sehingga dapat membangkitkan pendidikan domestik domestik Timor Leste. Oleh sebab itu sehingga, kerja samadengan Indonesia sangat memberikan jaminan bagi Timor Leste agar mengupayakan segala cara untuk segera membenahi pendidikan domestik, terutama bagi Timor Leste adalah memperbaiki, mengelola dan menjaga stabilitas politik domestik agar tidak menjadi polemik dalam urusan kerjasama, menciptakan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas pendidikan yang diharapkan negara di masa yang akan datang. Mulai menginvestasikan di bidang pendidikan dan sumber daya manusia untuk mampu mengelola sumber daya alam sebagai sumber perekonomian yang mendorongkerja sama-kerja sama luar negeri baik itu bilateral, multilateral dan regional.

Secara global, Indonesia merupakan negara yang berpotensi untuk mensinergikan kebijakan luar negeri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan luar negeri adalah salah satu yang paling banyak digunakan bagaimana mencapai tujuan kepentingan nasional yang baik secara kolektif dan pendidikan

yang berkualitas, sehingga alat komunikasi politik luar negeri seperti konsep praktik diplomasi dalam hubungan internasional sangat vital bagi suatu negara agar lebih memperhatikanya dengan baik dalam membentuk kebijakan luar negeri dan kerjasama luar negeri.

Sederhananya, globalisasi berarti bahwa ada kegiatan dimana pendidikan yang jauh lebih terjadi di pasar regional seperti ASEAN dan nasional, regional dan internasional semakin meningkatkan arus informasi antara negara-negara, dan juga organisasi-organisasi internasional seperti, MNC, WTO yang telah memperluas peranya dalam dunia pendidikan dan investasi secara langsung yang terkadang tidak melibatkan pihak pemerintah, hal ini disebabkan karena organisasi ini memiliki legitimasi dalam hukum internasional maupun domestik.⁸

Dilihat dari index prestasi pendidikan secara regional maupun global Indonesia bukanlah negara yang fokus berinvestasi di bidang pendidikan, namun mengapa ketika kebijakan luar negeri Timor Leste khususnya di bidang pendidikan lebih berfokus pada Indonesia paska merdeka dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Australia dan Portugal yang sudah memiliki prestasi-prestasi ilmu pengetahuan

⁸Cipto.B, Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Hal 244-246

dan tata kelola yang begitu sangat membantu warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.⁹

Beberapa faktor yang ikut mempengaruhi arah politik luar negeri Timor Leste, salah satunya adalah faktor ekonomi yang merupakan prioritas bagi pemerintah RDTL ketika dalam merancang kebijakan luar negerinya, perbedaan pembiayaan pendidikan (*tuition fee*), di universitas negeri maupun swasta di Indonesia dan di negara-negara lain sangat jauh berbeda, bahwasanya pemerintah Timor Leste sedang mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia domestik, perlu menyesuaikan dengan kapasitas ekonomi domestik dan pendapatan masyarakat juga kehidupan sosial budaya Timor Leste.

Hubungan kerja sama bilateral secara formal layaknya negara berdaulat antara Timor Leste dan Indonesia menjadi suatu fenomena kerja sama dalam era milenium. Rasanya berbeda dengan sebelumnya, kedua negara tersebut memiliki cerita yang cukup menyita perhatian dan waktu untuk mengingat kembali kenangan dan kejadian masa lalu, dimana rasa bahagia dicampur dengan luka yang seolah-olah menutupi hubungan persaudaraan kedua negara antara integrasi maupun referendum.¹⁰ Namun kebesaran hati dan kedewasaan politik yang dimiliki oleh para pemimpin dan pembuat kebijakan luar negeri kedua negara,

⁹www.weforum.org, diakses pada tanggal 17 tahun 2017

¹⁰ laporan akhir komisi kebenaran dan persahabatan indonesia - timor-leste, 31 Maret 2008

akhirnya terelisasi kembali hubungan persaudaraan antara masyarakat dan pemerintah setelah masa transisi Timor Leste tahun 2000-2002.

Berawal dari rasa persaudaraan yang tidak bisa terpisahkan, sehingga sampai terbentuklah kedua lembaga komisi penerimaan dan rekonsiliasi seperti *Komisaun Amizade Verdade Reconsiliaun (CAVR)* dan *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)*, dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik masa lalu yang menurut penulis merupakan instrument politik kepentingan pribadi dan golongan oleh para pemegang kekuasaan dengan tujuan-tujuan tertentu terutama konflik pro dan kontra kemerdekaan Timor Leste.

Berkat partisipasi PBB melalui *United Nation Transition Administration in East Timor (UNTAET)*, sehingga proses rekonsiliasi yang diinginkan kedua negara berjalan dengan baik, guna membuka peluang-peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Maka lahirlah dua lembaga menuju puncak rekonsiliasi, yaitu, *Komisi Penerimaan Kebenaran Dan Rekonsiliasi (CAVR)*, dan *Komisi Kebenaran Dan Persahabatan (KKP)*. Kepercayaan penuh dengan mandat dan ketentuan yang diberikan kepada CAVR melalui komisarisnya untuk menjalankan tugas dan mencari kebenaran dan fakta, demi membangun kembali hubungan yang harmonis dengan Indonesia. Tentu saja *komisi kebenaran dan persahabatan (KKP)* juga memiliki visi misi yang sama dengan CAVR yaitu saling

menerima, menegosiasikan dengan ikhlas dan tulus, sehingga dapat memfasilitasi proses rekonsiliasi berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, Timor Leste mengawali diplomasi dengan membangun, memulihkan kembali hubungan dengan Indonesia dimasa yang akan datang, sehingga bagi generasi baru Timor Leste, proses tersebut sebagai fenomena diplomasi dan kerja sama, dan suatu kewajiban bagi Timor Leste sendiri sebagai negara baru dalam era milenium, dan menjadi landasan serta acuan untuk lebih baik menjaga kerja sama, saling menerima dari pada membiarkan semaking parah akhirnya berpotensi menghambat laju pertumbuhan manusia dalam kemajuan pendidikan global kontempore. Disisi lain kesadaran RDTL akan negara kecil dan baru diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama kesadaran ini memberi dampak positif untuk lebih sabar dan terus mencari jalan keluar untuk menciptakan kerja sama-kerjasa ma yang baru dan tentu saja memenuhi kepentingan nasional dan masyarakat.

Sejak melepaskan diri dari Indonesia 17 tahun silam, berbagai tantangan yang dihadapi oleh Timor Leste. Sebagai negara berdaulat berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan.¹¹ Namun proses ini tidaklah mudah, layaknya negara-negara maju dan berkembang lainnya di

¹¹ <http://dikti.go.id/timor-leste-ingin-kembangkan-kerja-sama-di-bidang-pendidikan-tinggi-dengan-indonesia/>, diakses pada tanggal 6 Sep 2017

seluruh dunia, tentu saja menghadapi situasi yang sama pada awal pemerintahannya. Oleh karena itu, segala upaya yang dilakukan pemerintahan *Republic Democratic Timor Leste* (RDTL) dalam rangka membangun negaranya salah satunya melakukan reformasi di bidang pendidikan dan sumber daya manusia.

Menyoroti kebijakan sektor pendidikan Timor Leste paska kemerdekaan mengalami tumpukan tindih. Tarik menarik kepentingan politik menjadi faktor penghambat untuk melakukan reformasi secara menyeluruh terhadap perkembangan pendidikan domestik. Semenjak berdaulat tahun 2002, Timor Leste benar-benar mengalami fase transformasi secara masif di bidang pendidikan. Timor Leste mendapat dukungan humanitarian yang masif juga dari luar negeri di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Masa-masa pemulihan psikologi politik ditambah dengan serba kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini bukanlah mudah, sekolah-sekolah mengalami perubahan kurikulum dan bahasa, yaitu dulunya akrab dengan bahasa Indonesia, tiba-tiba mengajarkan dengan bahasa Portugis di sekolahan. Seolah hal yang aneh, tetapi nyata harus diterima di masyarakat umum, sebab konsekuensi dari suatu kemerdekaan.

Kerja sama melalui praktik diplomasi yang dilakukan negara kecil ini masih dikatakan baru, mengingat teritori RDTL merupakan provinsi yang terpisah dari NKRI. Kekurangan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat bagi RDTL untuk berdiplomasi secara besar atau yang dikenal

dengan multi track diplomasi. Namun hal itu tidak menjadi tolak ukur untuk membatasi pergerakan diplomasi Timor Leste. Justru kekurangan-kekurangan yang dihadapi saat ini, menjadi semangat bagi aktor negara dan non negara terutama bagi generasi penerus bangsa untuk membuka diri terhadap negara-negara di kawasan lain untuk menjalin kerja sama di aspek-aspek vital yang meliputi, diplomasi ekonomi, pendidikan, budaya dan juga berorientasi kepada diplomasi perorangan (*People To People Diplomacy*).

Keuntungan bagi Timor Leste untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Indonesia khususnya di bidang pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas menjadi salah satu agenda penting bagi negara untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, sehingga mampu mengembangkan ekonomi negara untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai warga negara.

Timor Leste lahir sebagai nation state dalam situasi politik internasional yang sangat demokratis. Bagaimanapun hambatan yang dihadapi Timor Leste namun terus optimis berjalan menuju terciptanya kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan strategi yang matang dan terarah untuk membangun fondasi perekonomian Timor Leste melalui menginvestasikan pada pendidikan masa depan.

Salah satu strategi yang diharapkan adalah menetapkan agenda politik luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan

satu kerja sama yang tentu saja menguntungkan Timor Leste sendiri, dan kerja sama lain baik dalam konsep bilateral, regional maupun multilateral. Pengambilan keputusan politik luar negeri menjadi penting bagi Timor Leste untuk mengetahui kemana arah kebijakan tersebut akan dibuat. Politik luar negeri sendiri didukung dan dipengaruhi oleh studi diplomasi yang telah mengalami perubahan yang signifikan sejak konsep awal diperkenalkan di kawasan Eropa yang ditandai oleh kongres Wina 1815.

Konsep pelaksanaan diplomasi mengalami perkembangan pesat sejak periode 1960an. Professor Mowat dalam bukunya "*Diplomacy and peace*" membedakan tiga periode perkembangan diplomasi, yang pertama pada tahun 476-1475, yaitu periode kegelapan dimana diplomasi belum terorganisir, periode kedua tahun 1473-1914 yang dikenal sebagai sistem negara Eropa, dan periode ketiga dimulai setelah diplomasi terbuka yang diperkenalkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang mengisyaratkan lahirnya diplomasi demokratis. Paradiplomasi merupakan diplomasi multilateral, dengan demikian paradiplomasi kontemporer telah memberikan ruang bagi aktor non negara untuk mendukung diplomat pemerintah, melalui membangun jaringan diplomasi internasional dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional, tentu saja dalam hal ini, khususnya aspek pendidikan suatu negara, selain itu dapat memperkuat peluang

kerja sama secara bilateral maupun multilateral di berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹²

Dalam melakukan politik luar negeri, konsep praktik diplomasi aktor non negara menjadi solusi yang tepat untuk “*Menghindari*” tarik menarik kepentingan diantara elite politik di tingkat pemerintah pusat, khususnya dinamika politik Timor Leste yang cenderung menghambat perkembangan pendidikan domestik. Oleh karena itu, Tesis ini hadir dengan optimis untuk memberi sumbangsih ide bagi pemerintah Timor Leste bahwa betapa penting membangun kapasitas manusia(*Human Resources Building*) untuk meningkatkan pendidikan sumber daya manusia berkualitas seperti sistem pendidikan di Indonesia yang telah terwujud hasilnya dalam pembangunan masyarakat yang berpengetahuan global, berwawasan teknologi dan mampu mengolah informasi-informasi yang bermanfaat melalui kebijakan pemerintah yang searah dengan situasi ekonomi politik internasional, juga selain itu konsep ini juga sejalan dengan situasi politik internasional yang demokratis dan liberalis.

Faktor ekonomi dan politik domestik sangat mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri setiap negara, liberalisasi ekonomi dan demokrasi yang memberi kewenangan lebih kepada aktor-aktor non negara untuk melakukan diplomasi, namun dalam pembentukan kebijakan politik luar

¹²Yulius, p, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional, Hal 51

negeri membutuhkan keahlian sesuai dengan latar belakang pendidikan individu (*personal riset*), dengan mengadakan kerja sama-kerja sama luar negeri dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial budaya, baik di tingkat regional maupun tingkat bilateral.

Perkembangan diplomasi kontemporer juga merupakan ajang pembukaan peluang kerja sama di berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Lahirnya diplomasi paska peran dingin (PD II), praktik diplomasi didorong oleh sejumlah faktor seperti faktor ekonomi, sosial-budaya, politik, dan pendidikan sehingga setiap negara di era peradaban memerlukan pentingnya diplomasi untuk bagaimana meningkatkan intensitas kerja sama untuk mencapai kepentingan nasional.¹³

Timor Leste sebagai negara baru, mempunyai tanggung jawab besar dalam meningkatkan pendidikan masyarakatnya terutama generasi penerus bangsa. Hal ini bukanlah mudah bagi setiap negara yang baru merdeka, ketidak stabilan perekonomian yang dihadapi setiap negara memberikan dampak negatif terhadap pendidikan negara itu sendiri, akibatnya, pemahaman dan analisis masyarakat sangat primitif untuk merespon situasi politik regional dan global, apalagi dinamika politik internasional yang memang dipahami oleh orang-orang yang berkompeten di dibidanya, akademisi dan

¹³Hermawan Yulius p, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Hal. 53.

aktivis yang juga didukung oleh literasi-literasi moderen yang mampu membaca arah situasi politik internasional yang bakal mempengaruhi politik ekonomi domestik. Dalam hal ini salah satu mekanisme adalah memberikan kebebasan secara demokratis kepada semua aktor untuk bebas aktif dalam hubungan internasional, dengan asumsi kerja sama dengan praktik diplomasi ini dapat meningkatkan pendidikan domestik negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Dari fokus pada diplomasi pendidikan telah mengubah persepsi bahwa kerja sama ini merupakan alat komunikasi kenegaraan untuk mempelajari karakter praktik diplomasi itu sendiri. Terhadap latar belakang ini, esai menyoroti bagaimana berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kerja samapendidikan, beberapa studi telah menunjukkan bahwa asal-usul yang sangat diplomatik di sebagian besar negara berkomitmen dalam mengembangkan hubungan baik dalam rangka memfasilitasi pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten.

Kebijakan dalam mengatur aktor praktik diplomasi pendidikan dapat didorong oleh kementerian luar negeri, namun berbicara mengenai pendidikan, tetap dibawah domainya menteri pendidikan. Akan tetapi melibatkan orang-orang dengan tanggung jawab pendidikan dan kepentingan dalam dan di luar pemerintah di semua tingkat pemerintahan.kementerian luar

negeri menjadi integrator atau koordinator diplomasi.¹⁴ Artinya, bekerja dengan '*mitra*', serta lembaga-lembaga pelatihan dan kelompok-kelompok sipil untuk menyampaikan tujuan secara details dan komprehensif. Sedangkan dalam dunia pendidikan pada peradaban global, masalah diplomasi pendidikan cukup kompleks untuk dikaji, sebab harus mempertimbangkan kapasitas para diplomat yang tentu saja memiliki kemampuan individu dalam ilmu pengetahuan, dengan demikian dapat merasakan keuntungan dari bagaimana cara membangun suatu kerja sama bilateral regional maupun internasional melalui seorang anggota diplomat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Timor Leste memilih Indonesia sebagai mitra kerja sama di bidang pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Indonesia dalam sektor pendidikan di Timor Leste.
- b) untuk mengetahui kebijakan luar negeri Timor Leste terhadap Indonesia.
- c) Untuk mengetahui seberapa banyak beasiswa yang diberikan Indonesia bagi Timor

¹⁴ Sebuah Potret Kerja sama (Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN), Hal .91

- d) Untuk mengetahui berapa banyak pelajar Timor Leste yang melanjutkan studi di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai pendalaman kajian terhadap sistem pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia Timor Leste
- b) Hasil penelitian ini akan berguna bagi pemerintah, peneliti, mahasiswa, INGO, NGO dan semua pihak yang tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana kerja sama kedua negara untuk meningkatkan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dalam segala ilmu pengetahuan khususnya bagi Timor Leste.
- c) Memberikan sumbangsih secara akademisi kepada pemerintah betapa pentingnya hubungan kerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan kapasitas masyarakatnya Timor Leste dengan ilmu pengetahuan yang berkualitas dan inovatif.

E. Originalitas Riset

Penelitian Tesis ini adalah benar-benar original (Asli), dan tidak memuat unsur plagiarisme dengan didukung sejumlah fakta akademik yang menunjukkan sisi kebaruan dengan studi penelitian sebelumnya tentang isu yang relative sama atau dalam satu disiplin ilmu.

F. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk mendukung penelitian sebagai bahan acuan, sekaligus berfungsi sebagai suatu framing. Studi pustaka juga digunakan sebagai bentuk telaah akademis mengenai posisi peneliti dalam membentuk opini atau argumentasi tentang suatu penelitian, sehingga terdapat suatu bentuk afirmasi atau penetapan dari ahli dan peneliti sebelumnya mengenai tema yang hampir mirip dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti.

Peneliti menggunakan sebuah tabel untuk menguraikan hasil studi pustaka oleh para peneliti terdahulu, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi perbedaan pendapat oleh para peneliti. Adapun beberapa ahli yang dikutip oleh peneliti antara lain, para pembuat kebijakan politik luar negeri suatu negara, pengamat pendidikan tinggi kedua negara, dan bantuan internasional dalam bidang pendidikan, sehingga uraian tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Table 1
Pengaruh Indonesia pada sektor pendidikan Timor Leste
dengan bantuan beasiswa

No	Penelitian Jurnal/Tesis	Uraian Singkat	Temuan
1	<p>Kusuma, Agus Renaldi Future Indonesia-East Timor relations: an analysis of the regional security practices in the Cold War and after.</p>	<p>Timor Leste dan Indonesia merupakan negara jajahan kolonial, namun dibalik invasi RI ke RDTL, Portugal telah 450 tahun mempengaruhi dan menduduki Timor Leste, sebelum RI melakukan invasi bulan Desember tahun 1975, sehingga pengaruh kehidupan sosial budaya ikut bergeser termasuk sektor pendidikan.</p>	<p>Bagaimana membantu Timor Leste untuk bangkit sebagai negara yang baru merdeka, khususnya di bidang ekonomi politik dan keamanan, mendukung administrasi transisi menuju pembentukan pemerintahan. Memperbaiki sistem pendidikan dan memulai investasi dalam sektor pendidikan dan sumber daya manusia</p>
2	<p>Badrus Sholeh Membangun Hubungan Damai</p>	<p>Terbentuknya lembaga mencari fakta memberikan</p>	<p>Keberhasilan rekonsiliasi membawa kedua</p>

	Indonesia dan Timor-Leste: Kerja sama Negara dan Masyarakat Sipil	kontribusi secara masif kepada masyarakat dan aktor elit politik kedua negara, untuk secepatnya melupakan sejarah masa lalu.	negara menuju kepada kebangkitan masyarakat membangun rasa persaudaraan dengan konsep “kaka-adik”.
3	Nene Correia De Almeida the difficult choices of a post-Colonial State : Timor Leste and International Education Aid	East Timor such young countries need lots of assistance from others country to help develop education system and rebuild human resources as a post-colonial state	Official Development Aid that had been delivered by Portugese and Australia not fully recovery Timor Leste education system as expected

Hubungan kerja samakedua negara tentu saja bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara, dalam hal ini kerja sama Indonesia dan Timor Leste dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penulis lebih sepakat dengan apa yang dikatakan ole *Nene Correia De Almeida*, bahwa suatu negara membutuhkan bantuan internasional terutama negara tetangga, dan bantuan-bantuan tersebut berupa barang dan jasa, dalam hal ini sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sektor

pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi negara-negara yang membutuhkannya seperti Timor Leste. Sehingga secara langsung kontribusi dari kerja sama tersebut bakal meningkatkan perkembangan pendidikan dengan mensosialisasikan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas untuk diadopsi, manfaat lain dari bantuan dan kerja sama internasional dan bilateral tersebut dapat memberikan kesempatan belajar berupa beasiswa kepada mahasiswa/I untuk bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi seperti hal yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste.

Dalam Tesis ini penulis akan melanjutkan beberapa hal yang kurang teliti, pertama, bagaimana kerja sama untuk memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan potensi sumber daya manusia, menyediakan pelatihan-pelatihan pengembangan ketrampilan di bidang teknik khususnya bagi Timor Leste, sebagai bekal sumber daya manusia yang potensial agar mampu melakukan diplomasi dan kerja samayang lebih luas dan lebih efektif di masa yang akan datang, khususnya meningkatkan intensitas kerja sama dalam pengembangan pengetahuan di seluruh bidang ilmu pengetahuan, memperbanyak kesempatan antara kedua negara, membuka peluang kerja sama dengan negara mitra regional, seperti, Cina, India, Australia, Jepang termasuk Korsel dan negara-negara kawasan Timor Tengah diberbagai bidang pengetahuan guna memperbaiki kebutuhan pendidikan dan sumber daya manusia yang handal dan praktis di

masa yang akan datang. Yang kedua, Tesis ini menerapkan politik luar negeri Timor Leste dengan slogan yaitu: “*Halo Belun Ho Se Deit Labele Cria Inimigo*” bahwa berhubungan baik dengan pihak dan negara mana saja namun jangan menciptakan permusuhan, atau *More Friendship Zero Enemy*.

G. Kerangka Teoritis

Sebelum penulis menyusun hipotesa atau jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, penulis akan menggunakan teori keterkaitan (*Linkage Theory*) yang akan dijadikan sebagai alat untuk menganalisa fenomena yang diangkat yaitu pengaruh Indonesia pada sektor pendidikan Timor Leste. Dan penulis akan menggunakan teori dari para pemikir-pemikir yang dianggap berada pada posisi pembuatan kebijakan politik luar negeri seperti *William D. coplin*.

Sehingga teori keterkaitan (*Linkage Theory*) yang telah diteliti secara praktisi oleh para ahlinya (*William D Coplin 1992*), mampu mengiring opini peneliti untuk lebih memahami lagi tentang bagaimana proses pembuatan kebijakan politik luar negeri yang baik dan menguntungkan dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kebutuhan masyarakat dan negara, untuk menata kehidupan sosial masyarakat secara struktur dan sistematis, mampu beradaptasi satu sama lain, mampu berintegrasi dengan modal ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya. Sehingga dalam implementasi kasus peningkatan

kerja sama Timor Leste dan Indonesia di bidang pendidikan, kapasitas perekonomian Timor Leste menjadi sorotan sebagai faktor pendorong dalam menentukan arah politik luar negeri khususnya menginvestasikan di bidang pendidikan,

1. Teori Kebijakan

Menurut *William D. Coplin* (1992) terdapat tiga faktor dalam pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara, ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kondisi politik dalam negeri

Dinamika Politik domestik berdampak besar terhadap arah politik luar negeri setiap negara, sistem pengaruh kebijakan (*policy influencer*) berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri, sehingga para pembuat kebijakan politik luar negeri mampu mengakumulasi isu-isu umum (*general*) dalam negeri dan mampu berinteraksi dengan aktor-aktor yang dianggap berpengaruh sehingga dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan dalam proses politik dalam negeri sehingga dapat menghasilkan politik luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional.¹⁵Aktor yang dimaksud adalah masyarakat, dan dukungan-dukungan yang positif.

b) Kemampuan ekonomi dan militer

Faktor ekonomi dan militer sangat berkaitan erat dengan pembentukan politik luar negeri suatu negara. Dimensi ekonomi relevan dengan penyusunan politik luar negeri, kapasitas produksi

¹⁵ Coplin, W. D. (1992). *Introduction to International Politics*. Syracuse University: Sinar Baru Algensindo, Hal 74

ekonomi dan kebergantungan pada perdagangan dan keuangan internasional mempengaruhi perilaku politik luar negeri. Masih banyak negara yang ekonominya rendah, terutama dalam memproduksi barang dan jasa dalam negeri yang masih sangat terbatas, sehingga lebih mengharapkan arus import dari negara lain dari pada ekspor yang memadai untuk menutup biaya impor.

Untuk menjaga stabilitas dalam negeri, negara kiranya tidak mengandalkan jumlah militer yang banyak, tingkat pelatihan, perlengkapan angkatan bersenjata, tetapi membutuhkan dukungan kekuatan militer luar negeri untuk ikut memelihara dan mengamankan kedaulatan suatu negara, sehingga dapat mendukung dengan kekuatan-kekuatan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri.¹⁶Oleh sebab itu, dalam hal kerja sama Timor Leste dan Indonesia yang merupakan negara satu daratan, bisa saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan ekonomi dan kekuatan angkatan bersenjata yang lebih berorientasi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat kedua negara.

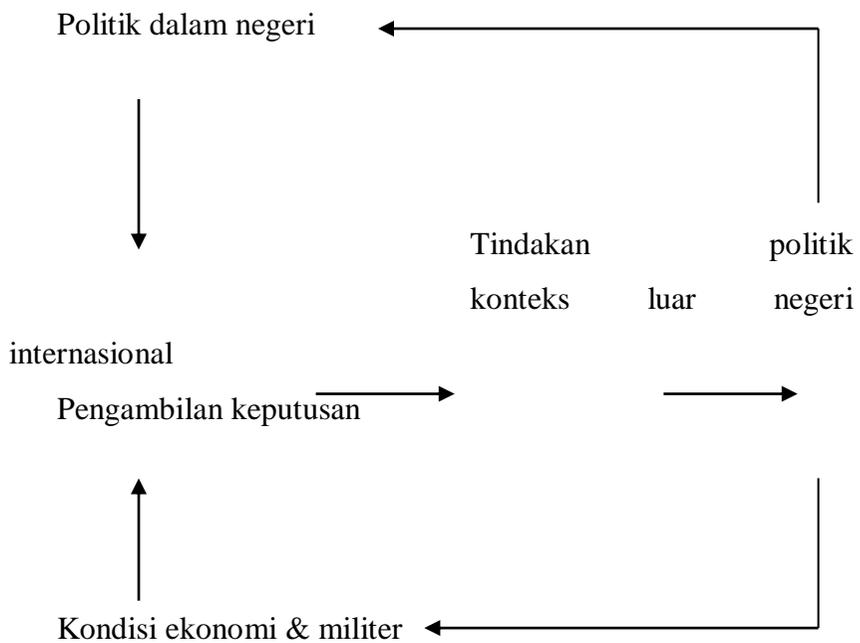
c) Konteks internasional

Konteks internasional meliputi tiga faktor yaitu, geografis, ekonomi dan militer. Geografis penting dalam menentukan konteks internasional suatu negara dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan logistik, pola perdagangan, pola aliansi keanggotaan dalam organisasi antarpemerintah dan pola pemberian suara

¹⁶Ibid, Hal 141-142

dalam majelis PBB. Juga interdependensi ekonomi menimbulkan dukungan serta tuntutan kepada pengambil keputusan politik luar negeri. Hubungan politik dalam kepentingan bersama merupakan bagian dari konteks internasional suatu negara.

Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri Dapat Dipengaruhi Oleh 3 Faktor, Seperti Yang Akan Digambarkan Sebagai Berikut:



Source : William D. Coplin (1992)

Kehidupan negara saling keterkaitan (*interdependent*) dan ada pula yang ketergantungan (*dependent*), berkaitan dengan perilaku pengambilan keputusan luar negeri dapat dipengaruhi oleh politik dalam negeri, politik luar negeri dan konteks internasional. Dalam ilmu hubungan internasional situasi politik global kontemporer telah mengalami pergeseran dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sehingga perilaku-perilaku politik luar negeri sebuah negara secara alami ikut berubah arah, sehingga secara fungsional negara satu membutuhkan negara lain sudah menjadi sejarah panjang paska perang duni II.

Suatu negara dapat dipengaruhi oleh negara lain dalam membuat kebijakan politik luar negerinya, peran dan isu-isu yang dapat mempengaruhi perilaku tindakan negara lain, salah satunya adalah dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dan politik luar negeri suatu negara, terutama negara-negara kawasan, seperti Eropa dan ASEAN.¹⁷

Dalam implementasi studi kasus pengaruh Indonesia pada sektor pendidikan Timor Leste, terdapat sejumlah faktor dan peristiwa sejarah yang memiliki hubungan keterkaitan yang telah mempengaruhi para aktor pengambilan kebijakan politik luar negeri Timor Leste, terutama dinamika politik dalam negeri Timor Leste yang dinilai belum stabil, hal ini telah menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah RDTL untuk menentukan arah politik luar negerinya. Pembangunan sektor pendidikan dan

¹⁷ Arthur A. Stein, Ibid 1

pengembangan sumber daya manusia di Timor Leste sendiri merupakan faktor domestik yang harus dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Bahwasanya mengapa kemudian setelah merdeka Timor Leste lebih memilih Indonesia sebagai sasaran utama negara yang membantu pembangunan pendidikan bagi Timor Leste, kapasitas ekonomi dapat menggambarkan adanya peristiwa pembangunan pendidikan di Timor Leste yang tidak seimbang dengan pendapatan ekonomi domestik, lebih tergantung pada negara pengimpor, sedangkan dalam konteks internasional yaitu berpengaruh oleh letak geografis, oleh sebab itu faktor ekonomi dan militer juga tentu ikut berperan dalam pembentukan arah politik luar negeri.

Alokasi dana pendidikan Timor Leste yang sangat rendah, hanya 13% dari total *OGE* atau APBN, total alokasi dana pendidikan tersebut sangat minim dibandingkan dengan alokasi dana pendidikan negara-negara lain khususnya regional ASEAN yaitu mulai 15%-20% (*Ministry Education Timor Leste, 2011*). Minimnya alokasi dana pendidikan menjadi salah faktor mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia Timor Leste. Paska merdeka sebagai negara baru, Timor Leste membutuhkan dana yang lebih besar khusus untuk membangun sektor pendidikan, untuk memperbaiki sistem pendidikan, membangun sarana dan prasarana yang layak, memberikan kesempatan melalui beasiswa bagi yang ekonominya tidak mampu. Tetapi keterbatasan dana

tersebut menjadi tolak ukur untuk mengurangi angka buta huruf (*non literasi*) paska kemerdekaan. Apalagi masyarakat bermimpi untuk menuntut pendidikan yang merata dan berkualitas, hal ini menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi pembangunan sektor pendidikan.

Timor Leste menghadapi kesulitan dalam memberantas masyarakat buta huruf (*non literasi*) yang sangat tinggi paska kemerdekaan, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurangi angka non literasi tersebut. Di celah pemerintahan dalam membuat kebijakan untuk pemeratakan pendidikan di seluruh pelosok tanah air, kesulitan pertama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan kebijakan-kebijakan berkaitan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi setiap Kabupaten, Kecamatan dan sampai di Desa. Minimnya cadangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Timor Leste, ditambah lagi dengan situasi politik domestik yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan program-program pendidikan yang diharapkan pastinya dapat mengurangi angka non literasi. Politik mencari jabatan, kepentingan individu, kelompok maupun partai justru merupakan faktor-faktor internal yang sangat tidak memihak pada pembangunan sektor pendidikan. Hal tersebut disebabkan adanya intervensi antar lembaga yang sama sekali tidak memiliki kewenangan, padahal lembaga yang berkompeten (*kementrian pendidikan*) berharap intervensi bisa

dilakukan bersifat membangun saling mendukung antar lembaga dengan opini berdasarkan ilmu pengetahuan yang relevansi dengan latar pendidikan yang dimiliki, namun yang terjadi adalah kepentingan dibalik intervensi, sehingga memaksakan suatu lembaga untuk tunduk dan harus memiliki loyalitas terhadap kelompok, individu dan partai yang memiliki kekuasaan materil dan masa.

Timor Leste tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dan atau ahli di bidangnya dalam merancang suatu sistem tata kelola yang baik dan berkontribusi untuk membangun dalam setiap lembaga pemerintah. Kurangnya sumber daya manusia yang berwawasan akademisi mengakibatkan tumpang tindih kebijakan untuk memutuskan dan mengimplementasi setiap program kerja pemerintah melalui lembaga-lembaga yang dipercaya untuk melakukan pekerjaannya secara structural dan fungsional. Pendapatan Timor Leste dari sumber daya alam minyak dan gas di Laut Timor yang sangat mencukupi bahkan melebihi jumlah penduduk Timor Leste itu sendiri. Faktanya *Osamentu Geral Estadu (OGE)* atau APBN setiap periode pemerintahan mencapai 1.500,0 US Dollar (*OGE 2012-2016*). Infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten memiliki alokasi dana yang sangat besar dari total *OGE*, target pemerintah untuk memajukan kehidupan ekonomi rakyat melalui pembangunan jalan dan jembatan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mobilitasi barang dan jasa. Tetapi pemerintah tidak menyadari

bahwa untuk mengimplementasikan program-programnya harusnya mencari orang yang memiliki keahlian di bidangnya, memiliki ilmu yang matang, yang telah lulus uji coba kelayakan melalui prosedur perekrutan, pengangkatan dan bahkan diharapkan menyalon dan memilih pemimpin yang telah terbukti membuat kebijakan dan bertindak secara obyektif, mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan partai politik. Akan tetapi sebagai generasi penerus bangsa, harapan-harapan tersebut menjadi tabuh di kalangan akademisi mudah, penulis ikut menyaksikan dan mengawal melalui media dan berita bahwaapa yang terjadi dalam tiga periode pemerintahan di Timor Leste merupakan masalah pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia yang bisa berkontribusi dengan modal ilmu pengetahuan bukan materi dan KKN sehingga akibatnya setiap tahun angka buta huruf justru meningkat, apalagi harapan masyarakat untuk hidup dalam ekonomi yang rata-rata dan sejahtera.

Dinamika politik domestik yang tak kunjung stabil pada setiap periode pemerintahan mempengaruhi fokus pemerintah dalam membangun sektor pendidikan di Timor Leste, seperti sarana dan prasaran yang menjadi kebutuhan dasar utama untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Kepentingan pribadi dan partai atas jabatan dan kekuasaan untuk memimpin pemerintahan dengan asumsi untuk menguasai kekayaan sumber daya alam menjadi agenda politik dan tujuan visi misi untuk mempengaruhi masyarakat melalui opini publik dan retorika politik yang di

lontarkan para otoritas pada setiap kesempatan di pangun politik di Timor Leste.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa hal-hal tersebut diatas berakibat fatal dalam pembangunan sektor pendidikan di Timor Leste, tidak hanya pendidikan, Timor Leste juga merupakan negara yang masih ketergantungan terhadap negara-negara lain serta donator internasional di segala aspke kehidupan masyarakat termasuk ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, dengan kehadirannya penelitian Tesis ini, diharapkan dapat membantu pemerintah Timor Leste untuk lebih banyak lagi mengalokasikan dan pada sektor pendidikan sehingga mimpi negara untuk kesejahteraan bagi masyarakat pada masa yang datang akan terwujud.

H. Hipotesa

Argumentasi sementara yang dapat menjawab rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah:
Indonesia memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia Timor Leste paska kemerdekaan.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Data Primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di kementrian terkait di Timor Leste seperti kementrian luar negeri, kementrian keuangan, kedubes Timor

Leste untuk Indonesia di Jakarta, Atase kerja sama pendidikan. Data Sekunder adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka, literatur, buku-buku serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan peningkatan kerja sama kedua negara dalam bidang pendidikan.¹⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, seperti peneliti pustaka (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Serta dokumen yang berhubungan dengan kapasitas perekonomian Timor Leste dalam meningkatkan kualitas pendidikan domestik, serta perkembangan dan hambatan bagi mahasiswa/I Timor Leste yang kuliah di Indonesia, baik yang beasiswa dari kedua pemerintah maupun pribadi.

Dokumen kerja sama dalam bidang pendidikan yang berkualitas dan berkompeten antara Indonesia dan Timor Leste. Data jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet dan juga laporan-laporan penelitian yang berhubungan dengan kerja sama bidang pendidikan. Dalam menggambarkan permasalahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan tergantung pada validitas data oleh individu dan organisasi terkait

¹⁸ Lexy J. Moleong , *Metodoogi Penelitian Kualitatif*

(*Informan*) yang memberikan informasi details dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut:

a) Dokumen

Dokumen-dokumen terkait digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, khususnya menyangkut dokumen tentang kerja sama Timor Leste dan Indonesia di bidang pendidikan.

b) Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di *Universidade Naional Timor Leste* (UNTL), semenjak peneliti aktif sebagai Magister di UMY (dalam sejarah dan media masa) sistem data observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung, sejauh mana pengaruh kurikulum sistem pendidikan Indonesia di Timor Leste, dan juga menyoroti besarnya kesempatan kerja sama di bidang pendidikan dengan Indonesia.

c) Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang memiliki kompetensi penuh, mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini pihak otoritas UNTL, atase kerja sama bidang pendidikan, adapun mekanisme lain untuk mendapatkan respon secara details seperti menemui

langsung pihak atase pendidikan di Indonesia, ataukah personal email dan via telepon.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga mengambil sebuah kesimpulan.¹⁹

J. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini, akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan yang utuh, sehingga dapat memahami, dan mendiskripsikan serta menganalisis dengan mudah mengenai permasalahan pokok dalam penelitian ini

Sistematika penulisan pada Tesis ini akan dibagi menjadi lima, yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menceritakan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Timor Leste di bidang pendidikan, Bab ini mencatat rendahnya alokasi dana pendidikan menyebabkan angka non literasi yang tinggi di Timor Leste paska merdeka, dinamika politik domestik yang tak kunjung stabil memberikan dampak negative terhadap kebijakan dan tata kelola pendidikan di Timor Leste,dan bagaimana membuka kembali peluang-peluang kerja

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Hal 157-162

sama dengan Indonesia melalui mekanisme praktik diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara antara kedua pemerintah dan masyarakatnya, juga menggambarkan seberapa pentingnya peran Indonesia dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia Timor Leste yang kreatif, inovatif dan berkompeten.

Beberapa sub bab yang termuat dalam bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan manfaat penelitian, d) originalitas riset, e) kerangka teori, f) jenis penelitian, g) metode pengumpulan data, h) metode analisis data, dan i) sistematika penulisan.

BAB II :KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIMOR LESTE TERHADAP INDONESIA

Bab ini menggambarkan tentang bagaimana kebijakan luar negeri Timor Leste terhadap Indonesia paska disahkan sebagai sebuah negara berdaulat, mencatat sejarah-sejarah hubungan harmonis kedua negara paska merdeka tahun 2002, salah satu kebijakan luar negeri Timor Leste terhadap Indonesia khususnya di bidang pendidikan, Timor Leste memutuskan untuk melakukan kerja sama secara intensif dengan pemerintah republic Indonesia di bidang pendidikan, guna memperbaiki dan membangun sumber daya manusia Timor Leste yang masih kurang dalam ilmu pengetahuan untuk mengelola sistem pendidikan di Timor Leste terutam dalam mengeksplorasi sumber daya alam untuk mendukung ekonomi domestik.

BAB III : SIGNIFIKANSI PENDIDIKAN INDONESIA TERHADAP TIMOR LESTE

Pada Bab ini, akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya Indonesia bagi Timor Leste di bidang pendidikan, sistem pendidikan Indonesia sangat mempengaruhi pendidikan di Timor Leste paska merdeka, mulai dari tingkat SD sampai pada perguruan tinggi. Pada bab ini tercatat sekitar 7000 lebih mahasiswa/I Timor Leste yang melanjutkan studi di Indonesia, yang tersebar di seluruh propinsi di Jawa, Sumatra, Kalimantan, NTT, Jakarta dan Bali, jumlah tersebut pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemberian beasiswa oleh pemerintah Indonesia kepada mahasiswa/I Timor Leste khususnya di perguruan tinggi negeri seperti, UGM, UJB Malang, ITB, UI, UPN, Universitas Presiden, ITS, UNS dan UNAIR. Tercatat banyak kerja sama-kerja sama di bidang pendidikan antara pemerintah Timor Leste dengan Universitas di Indonesia, diikuti dengan kunjungan kerja oleh jajaran kementerian setiap periode merupakan penguatan bagaimana solidnya hubungan kedua negara di segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMERINTAH TIMOR LESTE UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA PENDIDIKAN DENGAN INDONESIA

Dalam bab ini, menjelaskan beberapa faktor yang mendorong peningkatan kerja sama Timor Leste terhadap Indonesia di bidang pendidikan, Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan keterkaitan sejarah yang tidak bisa dipisahkan ketika mengkaji secara mendalam antara kedua pemerintah dan masyarakat di semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial budaya dan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat Timor Leste merasa memiliki Indonesia sebagai suatu kado istimewa dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi dan pendidikan domestik. Faktor-faktor tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat Timor Leste untuk tidak berpikir dua kali dalam memutuskan anaknya melanjutkan studi di Indonesia, biaya pendidikan yang sangat terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa/I Timor Leste menjadi titik pilihan utama Indonesia sebagai obyek dan ikon pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Timor Leste, selain letak geografis yang masih satu daratan antara Timor Leste dengan Indonesia, kesamaan bahasa menjadi alat komunikasi utama bagi mahasiswa/I Timor Leste untuk dapat mempelajari ilmu pengetahuan secara details dan komprehensif.

BAB V :PENUTUP

Pada Bab ini, akan menyimpulkan isi keseluruhan dari Tesis tersebut, sehingga Bab ini Berisi: a) Kesimpulan b) Saran, oleh karena itu Tesis ini sendiri lum sempurna sebagaimana mestinya, dengan demikian mohon dilengkapai bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengangkat pembahasan tentang isu yang sama yaitu mengenai “*Pengaruh Indonesia Dalam Pendidikan di Timor Leste*”.